

KPK ENDUS RUMAH SAKIT 'SUNAT' INSENTIF NAKES



Sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19, nasib tenaga kesehatan (nakes) Indonesia nelangsa. Setelah akhir Januari lalu nyaris saja pemerintah menurunkan insentif--meski akhirnya tetap disamakan seperti tahun 2020--kini kabar tak sedap kembali menyeruak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi insentif nakes 'disunat' sebesar 50 hingga 70 persen oleh manajemen rumah sakit (RS). Duh, ada apa dengan adab di Indonesia saat ini?

Baca Hal 11

INSENTIF TENAGA KESEHATAN (Per Orang Per Bulan/OB)

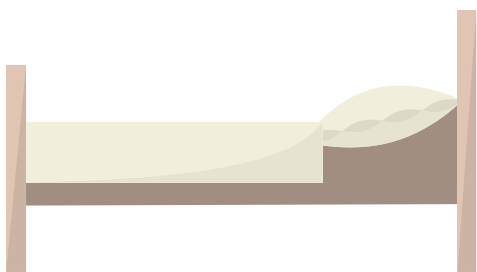
1. Dokter spesialis **Rp 15 juta/OB**
2. Dokter umum dan gigi **Rp 10 juta/OB**
3. Bidan dan Perawat **Rp 7.500.000/OB**
4. Tenaga Medis lainnya **Rp 5 juta/OB**
5. Lainnya:

- Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang ikut dalam penugasan khusus residen dan dokter yang mengikuti program internship dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan Covid-19 **paling tinggi Rp 10 juta.**
- Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, **besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.**

- Insentif untuk dokter yang mengikuti pendayagunaan dokter spesialis yang terlibat dalam penanganan Covid-19 **paling tinggi Rp 15 juta.**
- Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, **diberikan sesuai dengan besaran setiap jenis tenaga kesehatan.**
- Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan **setinggi-tingginya sebesar Rp 5 juta** setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

- Dokter yang mengikuti program internship dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan Covid-19 **paling tinggi sebesar Rp 5 juta**
- **Santunan kematian Rp 300 juta** bagi tenaga kesehatan yang meninggal terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- Insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menangani Covid-19 **setara dengan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Puskesmas.**

Sumber : Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020.

**KABAR BAIK PPKM****KETERISIAN RANJANG PASIEN CORONA TURUN,
PALING SIGNIFIKAN DI JATENG**

Jakarta- Satgas Covid-19 mencatat tren positif pada keterisian tempat tidur bagi pasien corona di rumah sakit rujukan di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM. Dalam perkembangan terbarunya, juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, menyatakan penurunan bed occupancy rate (BOR) ini terlihat paling signifikan dialami Jawa Tengah (Jateng).

"Keterisian tempat tidur saat ini seluruhnya mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum PPKM. Penurunan paling signifikan terjadi di Jawa Tengah dari 74,9 persen pada sebelum PPKM, menjadi 35,76 persen per 19 Februari," kata Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (23/2).

Meski begitu, Wiku meminta pemerintah daerah untuk menganalisis, apakah penurunan BOR ini dikarenakan menurunnya pasien bergejala sedang-tingan yang membutuhkan perawatan, atau pasien positif corona tidak terjaring.

"Namun adanya penurunan keterpakaian tempat tidur perlu diperhatikan lebih lanjut. Apakah karena pasien positif dengan gejala sedang berat yang makin berkurang, atau orang yang butuh pelayanan kesehatan belum atau tidak terjaring sejak dini, sehingga tidak dirawat di rumah sakit," tuturnya.

Wiku juga berpesan ke seluruh pemda untuk memastikan setiap orang yang ter-

jaring positif COVID-19 untuk ditangani secepat mungkin. "Tidak hanya pada pasien yang terjaring dari pemeriksaan di puskesmas, namun juga pemeriksaan mandiri dengan memastikan pasien melaporkan ke RT, RW dan puskesmas," tutup Wiku.

Data terbaru, jumlah kasus virus Corona Covid-19 di Indonesia bertambah 9.775 pada Selasa (23/2/2021). Total positif menjadi 1.298.608, sembuh 1.104.990, dan meninggal 35.014 kasus.

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini ada 65.431. Sementara jumlah suspek saat ini ada 78.616. Sementara total kasus aktif alias pasien yang masih terinfeksi Covid-19 tercatat sebanyak 158.604 orang, bertambah 1.456 dibandingkan kemarin.

Kasus Aktif Fluktuatif

Sementara, kasus aktif di 7 provinsi disebut menunjukkan fluktuasi. "Perkembangan kasus aktif secara umum di 7 provinsi ini masih menunjukkan fluktuasi di mana rata-rata baru menunjukkan penurunan pada periode PPKM tahap ke-3," ujar Wiku Adisasmito.

Ketujuh provinsi ini yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data merupakan update data pada 19 Februari 2021. Wiku mengatakan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta kasus aktif mengalami penurunan pada PPKM tahap ke-3.



Petugas kesehatan sedang berjaga di ruang perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) darurat Kota Bogor.

"DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta trendnya menunjukkan penurunan pada saat memasuki periode PPKM tahap ke-3 atau Minggu ke-5 PPKM," kata Wiku.

Sedangkan untuk Jawa Timur, penurunan kasus aktif disebut terjadi sejak PPKM tahap kedua. Sedangkan kasus aktif di Jawa Tengah mengalami peningkatan. "Bahkan Jawa Timur mengalami penurunan sejak pada PPKM tahap kedua, namun masih ada provinsi yang masih menunjukkan fluktuatif cenderung meningkat yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah masih terus meningkat tren kasus aktifnya, bahkan sejak PPKM tahap ke satu dilaksanakan," tuturnya. (ist)

**SEBARAN BOR DI
7 PROVINSI PPKM**

(Data per 19 Februari 2021)

DKI JAKARTA

- Sebelum PPKM: 86,45 persen
- PPKM tahap I: 86,15 persen
- PPKM tahap II: 73,44 persen
- 19 Februari 2021: 67,15 persen

JAWA BARAT

- Sebelum PPKM: 78,89 persen
- PPKM tahap I: 75,97 persen
- PPKM tahap II: 59,51 persen
- 19 Februari 2021: 57,25 persen

BANTEN

- Sebelum PPKM: 87,59 persen
- PPKM tahap I: 80,51 persen
- PPKM tahap II: 65,66 persen
- 19 Februari 2021: 63,22 persen

BALI

- Sebelum PPKM: 47,30 persen
- PPKM tahap I: 67,76 persen
- PPKM tahap II: 60,95 persen
- 19 Februari 2021: 58,28 persen

DI YOGYAKARTA

- Sebelum PPKM: 84,47 persen
- PPKM tahap I: 81,54 persen
- PPKM tahap II: 63,04 persen
- 19 Februari 2021: 52,21 persen

JAWA TENGAH

- Sebelum PPKM: 74,90 persen
- PPKM tahap I: 65,17 persen
- PPKM tahap II: 44,59 persen
- 19 Februari 2021: 35,76 persen

JAWA TIMUR

- Sebelum PPKM: 78,82 persen
- PPKM tahap I: 69,72 persen
- PPKM tahap II: 54,20 persen
- 19 Februari 2021: 46,19 persen

SE KAPOLRI TERKAIT UU ITE TERSANGKA MEMINTA MAAF TAK PERLU DITAHAN, DPR BILANG CEGAH KRIMINALISASI

Jakarta-Dalam penanganan kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk tidak menahan tersangka yang sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Kapolri menekankan kepada anggotanya untuk mengedepankan upaya mediasi dalam penanganan kasus ITE.

"Selama berkas belum diajukan ke JPU, tersangka dan korban diberikan ruang untuk mediasi," sebut Kapolri Listyo dalam Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021, tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif dikutip Selasa (23/02).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Heru Widodo menilai SE Kapolri konstruktif untuk demokrasi dan hak berekspresi masyarakat. SE itu dinilai mencegah upaya kriminalisasi dan menjamin ruang digital menjadi produktif, sehat dan beretika.

Terkait permintaan maaf tersangka, Heru menilai tidak cukup membatalkan hukum berjalan. Agar ada efek jera bagi setiap pelaku. "Bukan setelah dimaafkan kemudian di edukasi dan perkara hukum selesai juga. Ini akan tidak sehat karena bisa-bisa hanya tobat sambel," ucapnya.

Terpish, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mendukung SE Kapolri sebagai bagian dari restorative justice yang ingin dikembangkan Jenderal Sigit. "Ya bagus. Itu bagian dari restorative justice, yang mau dikembangkan oleh Kapolri," ujar politikus yang akrab disapa Awiek itu.

Hanya saja, Awiek menilai bukan berarti setelah tersangka meminta maaf lalu proses hukumnya tidak berjalan. Dia melihat di satu sisi aspek kemanusiaan karena sudah meminta maaf sehingga tidak dilakukan proses penahanan terhadap tersangka.

Sekretaris Fraksi PPP ini menilai, SE itu memberikan persepsi kepada publik ada ikhtiar Kapolri yang ingin mengedepankan yang aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penegakan hukum di institusi yang dipimpinnya. "Karena selama ini ada celah, dilaporkan bisa langsung ditahan karena ancamannya di atas lima tahun," kata Awiek.

Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat

BEBERAPA PEDOMAN PENYIDIK TERKAIT KASUS UU ITE

- Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,
- Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,
- Sejak penerimaan laporan, penyidik diminta berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
- Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remedium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,
- Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice, kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), radikalisme, dan separatisme,
- Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,

melalui ruang digital.

Menurut Listyo, Polri akan selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif, sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Selain itu, agar tetap menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika dan produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.(ist)

PAN TARGET JADI PARTAI 3 BESAR, DPW JATIM 'TURUN GUNUNG' KE KOTA BLITAR

BLITAR - Setelah 3 periode gagal mendapatkan kursi DPRD, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan langsung menunjuk Bendahara Umum DPW PAN Jatim, Heri Romadhon 'turun gunung' menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN Kota Blitar. Langkah ini dilakukan agar bisa mengembalikan kejayaan, dengan meraih 5 kursi legislatif dan target masuk partai 3 besar partai di Kota Blitar.

Untuk diketahui, selama ini 3 besar partai di Kota Blitar dipegang oleh PDIP, PKB dan PPP. Dengan kekuatan di legislatif, PDIP 11 kursi, PKB 4 kursi dan PPP 3 kursi dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar.

Penunjukkan aklamasi Heri Romadhon menjadi Plt Ketua DPD PAN Kota Blitar ini, merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) Bersama V PAN yang digelar secara virtual atau daring bersamaan dengan 56 DPD dari 3 provinsi yakni NTT, Sultra dan Jatim. Musda langsung dipimpin Ketum PAN, Zulkifli Hasan didampingi jajaran DPP, serta diikuti oleh Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadiq dan pengurus.

Setelah dibuka oleh Zulhas panggilan Zulkifli Hasan, dilanjutkan dengan pembacaan nama tim formatur DPD dan penunjukkan Ketua DPD bergantian secara aklamasi. Mekanismenya sebelum Musda tiap DPD menyetorkan nama calon formatur kepada DPP melalui DPW, kemudian diseleksi dan

ditentukan oleh DPP.

Ketika giliran DPD PAN Kota Blitar, oleh Zulhas langsung diputuskan dan ditunjuk Bendum DPW PAN Jatim, Heri Romadhon menjadi Plt Ketua. "Untuk DPD PAN Kota Blitar, saya percayakan kepada Pak Heri Romadhon yang juga pengurus DPW PAN Jatim," kata Zulhas.

Demikian juga untuk pembentukan kepengurusan DPD, Zulhas juga menyerahkan sepenuhnya kepada Heri Romadhon yang kini juga anggota DPRD Provinsi Jatim.

Setelah Musda ditutup, dilanjutkan penyerahan panji PAN dari Ketua DPD PAN Kota Blitar Demisioner, Joko Nurbatin yang sudah menjabat 2 periode 10 tahun. Kepada Plt Ketua PAN Kota Blitar yang baru, Heri Romadhon.

Selanjutnya Joko Nurbatin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pengurus, selama 10 tahun menjadi Ketua PAN Kota Blitar. "Karena ikhtiar sudah kita lakukan, tapi belum berhasil menghantarkan kader PAN menjadi anggota legislatif selama 3 periode sejak 2004," kata Joko.

Joko juga minta maaf, jika selama memimpin ada kesalahan. Serta mendoakan, semoga dengan kepengurusan yang baru PAN Kota Blitar bisa semakin maju dan sukses. "Mengembalikan kejayaan PAN di Kota Blitar, mendapat kursi kembali di



Plt Ketua DPD PAN Kota Blitar, Heri Romadhon menerima panji PAN dari Ketua PAN Kota Blitar Demisioner, Joko Nurbatin

legislatif," pungkasnya.

Plt Ketua DPD PAN Kota Blitar, Heri Romadhon menyampaikan akan terap bekerja sama dengan pengurus PAN Kota Blitar yang sekarang. "Saya jamin akan tetap aktif, untuk melakukan konsolidasi partai dan mengajak seluruh kalangan bergabung dengan PAN," tutur Heri yang sudah pengalaman 3 periode menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Blitar ini.

Heri juga akan melakukan roadshow, untuk merangkul seluruh golongan baik nasionalis maupun nahdliyyin. Menjadikan PAN Kota Blitar partai yang terbuka untuk siapa pun, inklusif dan pluralisme. "Siapa pun baik kader maupun bukan, boleh menjadi pengurus dan caleg PAN. Kami akan berikan subsidi terhadap caleg pada Pileg 2024, serta target meraih 5 kursi dan masuk partai 3 besar di Kota Blitar," tegas Heri yang sukses menghantar PAN memiliki 7 kursi DPRD Kabupaten Blitar ini.(ais)

Foto: Ais/LenteraToday

1 APRIL, BANDARA UDARA BAKAL PAKAI SKRINING GeNose

Jakarta – Saat ini alat skrining GeNose baru digunakan di stasiun kereta. Ke depan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut penggunaannya juga akan menyasar moda transportasi pesawat terbang. Keputusan itu dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan instansi serta Universitas Gajah Mada.

"Saat ini animo masyarakat bagus dalam penggunaan di sektor kereta api. Bahkan saat ini teman-teman dari sektor udara menginginkan penggunaan GeNose di sektor udara. Makanya kita laporkan kepada pak Menko PMK terkait rencana itu, tentu kita akan melakukan dengan hati-hati," kata Budi dalam konferensi pers, Selasa (23/02).

Ia melihat apa yang dilakukan sektor kereta api saat sudah menunjukkan hasil yang baik, sehingga layak dicoba pada moda penerbangan lainnya. Walaupun masih ada penyempurnaan terkait mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih paten.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, mengungkapkan kegembiraannya lantaran tes GeNose sudah mendapat izin dari Menko Luhut. "Kami di sektor perhubungan udara sangat senang, gembira sambut GeNose yang tadi sudah disampaikan, per 1 April akan kita gunakan. Dan itu jadi salah satu opsi. Sekarang kan hanya PCR dan rapid antigen," tuturnya.

Targetkan 44 Stasiun

Terpisah, Direktur Utama Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan penggunaan GeNose pada awal sosialisasi hanya di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Tugu



Calon penumpang kereta api menggunakan tes GeNose untuk mendeteksi virus Covid-19

Yogyakarta. Namun seiring pengembangannya sudah bertambah hingga 6 stasiun di Gambir, Bandung, Cirebon, Semarang, Tawang, Surabaya dan Pasar Turi.

"Rencana kami setiap 10 hari akan ditambah 5 fasilitas GeNose di beberapa stasiun sampai berjumlah 44 stasiun targetnya. Tapi ini juga menyesuaikan kapasitas dari UGM," katanya.

KAI menjadi operator pertama yang menggunakan alat skrining GeNose. Saat ini sudah memiliki alat GeNose sebanyak 42 alat dimana pada 22 Februari lalu mendeteksi 63 ribu penumpang dengan total penumpang positif sebanyak 617 orang.

Didiek menjelaskan respon penumpang KAI sangat positif melihat cara penggunaan

alat GeNose yang lebih nyaman dibanding rapid antigen atau PCR. Selain itu harga yang murah membuat perjalanan penumpang KAI semakin masuk akal, mengingat tiket kereta api ada yang di bawah Rp 100 ribu.

Penemu GeNose Profesor Kuwat Triyana mengatakan jajarannya juga akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas teknologi dari GeNose. Terkait isu negatif atau positif palsu dia akan terus mengevaluasi dan memantau penggunaan alat yang ada saat ini sehingga bisa lebih akurat.

"Kinerja alat produksi sudah ada yang menangani dan terus mengawal kinerja alat. Isu negatif palsu kita upayakan sekecil mungkin. Mudah mudahan sampai 0%, tapi itu itu perlu waktu yang cukup lama," katanya. (ist)

SEBULAN PPKM DI SURABAYA, DENDA PELANGGARAN CAPAI RP 724 JUTA

SURABAYA – Pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) satu bulan lebih, Pemkot Surabaya telah memberi sanksi kepada ribuan pelanggar. Baik perorangan maupun pelaku usaha yang tidak mentaati protokol kesehatan. Total denda yang terkumpul pun mencapai Rp 724 juta.

"Untuk perorangan diantaranya karena tidak pakai masker, kemudian berkerumun, itu kami sanksi penyitaan KTP dan juga peneanaan denda administratif. Usaha yang melanggar ketentuan dari PPKM tentunya ada usaha mikro, usaha kecil, ada menengah dan ada usaha besar," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatar, Selasa (23/02).

Secara rinci, selama PPKM mulai 11 Januari hingga 18 Februari terdapat 8.413 pelanggar perorangan. Sedangkan pelaku usaha terdapat 120 yang melanggar. Dari ribuan pelanggar protokol kesehatan perorangan, denda administratif yang



Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatar

terkumpul sekitar Rp 724.650.000.

"Hingga saat ini (pelanggar pemilik usaha) sudah ada menyelesaikan kewajibannya tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) sekitar Rp

28.500.000," sebutnya.

Denda pelanggar akan masuk ke rekening kas daerah sebagai bentuk sanksi PPKM. Termasuk pendapatan lain, tak hanya berfokus pada denda PPKM.

"Langkah kita adalah bagaimana agar masyarakat sadar. Denda ini kan hanya sebagai bentuk pendisiplinan kepada masyarakat. Kita tidak senang semakin banyak denda yang didapat, otomatis kan masih banyak pelanggar yang kurang disiplin. Bukan besar kecilnya denda, kita mencoba memberikan edukasi bahwa proses itu penting," jelasnya.

Besaran denda yang diberikan masih sama, yakni Rp 150 ribu untuk perorangan. Sedangkan pelaku usaha bisa hingga Rp 25 juta. "Sekarang ini pelanggaran masih banyak didominasi pelanggaran perorangan. Kadang itu anak usia 16-17 tahun tidak menggunakan masker, otomatis orang tuanya yang membayar denda," pungkasnya. (Ard)

DBHCTH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 FOKUS KESEHATAN

PASURUAN- Sektor kesehatan menjadi perhatian utama pada program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 ini. Bukan hanya untuk rumah sakit – rumah sakit, namun juga untuk membeli alat-alat kesehatan yang mahal hingga menyokong 'perang' melawan pandemi Covid-19.

"Kemudian Dinas Kesehatan juga punya Puskesmas-Puskesmas itu juga disuport dana cukai," Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifuddin Ahmad dikutip Selasa (23/02).

Kepala Dinas Kominfo yang akrab dengan panggilan Ifud ini juga menjelaskan bahwa pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur rumah sakit, Puskesmas sampai di tingkat yang paling bawah seperti Pustu, Polindes atau Poskesdes semua rata-rata menggunakan dana dari DBHCHT, terutama untuk pelayanan dasar kesehatan.

Untuk diketahui, sebelumnya ada dua rumah sakit yang pembiayaan pembangunan dan pengadaan barangnya menggunakan dana dari DBHCHT. Dua rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil dan RSUD Grati.

"Rumah sakit yang sudah menggunakan cukai juga ya ke rumah sakit Bangil dan sakit Grati. Jadi pembangunan rumah sakit Grati itu sebagian besar dari dana Cukai. Kemudian, instalasi-instalasi medis itu di RS Bangil itu juga dana cukai. Mulai instalasi paru dan jantung 3 lantai itu juga dari dana cukai," tandasnya.

Untuk diketahui, RSUD Grati, merupakan Rumah Sakit pertama di Jawa Timur yang pembangunannya menggunakan DBHCHT. Peresmian RSUD tersebut dilakukan Bupati



Kapalres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan menjalani screening sebelum menerima vaksinasi Covid-19.

Pasuruan, Irsyad Yusuf pada Selasa, 13 Februari 2018 lalu. Pembangunan RSUD ini menelan anggaran Rp 30,37 miliar.

Perencanaan RSUD Grati sudah sejak 2004 lalu dan selesai pada 2017. Pembangunan RSUD Grati sebagai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga. Yang paling penting adalah untuk pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Dalam peresmian saat itu, Bupati Pasuruan, Gus Irsyad sempat mengatakan bahwa akan terus menambah pembiayaan rumah sakit. RSUD Grati memiliki 70 ruangan,

termasuk ruangan kelas tiga, dua, satu dan VIP. Bukan hanya itu, juga ada Unit Gawat Darurat, Ruang Bersalin, dan 4 poli, dari poli umum, poli gigi, poli anak dan poli kandungan. Kemudian juga ada ahli penyakit dalam dan bedah.

Di tahun 2021 ini sektor kesehatan memang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pandemi Covid-19 membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terinfeksi membutuhkan anggaran besar. Tak hanya itu vaksinasi juga terus digulirkan.

Pemkab Pasuruan sebenarnya telah mengusulkan sebanyak 1.016.774 vaksin Covid-19 ke Pemprov Jatim. Pengajuan itu berdasarkan usia sasaran vaksinasi, antara 18 tahun hingga 59 tahun, seperti yang diinstruksikan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dr Ani Latifah mengatakan total vaksin yang disuntikkan kepada para pejabat publik dan tenaga kesehatan di tahap kedua ini sebanyak 4.451 orang. Jumlah tersebut melebihi kuota yang diberikan oleh Pemprov Jatim di tahap pertama sebesar 4.340 orang. Untuk itu, sisa 111 nakes yang belum divaksin akan dimintakan kembali melalui Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

"Jadi ceritanya, tahap pertama khan ada 4.340 dosis, kemudian di tahap kedua ada 4728. Setelah beberapa hari, diketahui banyak nakes yang gagal vaksin dan akhirnya kita relokasi ke nakes yang belum divaksin. Ketemulah 4.451 orang total yang harus divaksin di tahap kedua, sehingga kurangnya akan kita mintakan ke Pemprov Jatim," terangnya.(adv)



Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifuddin Ahmad

IMPRESSION

A close-up portrait of a young woman with light brown hair styled in a bun with bangs. She is wearing a dark green turtleneck sweater and has a soft smile. The background is slightly blurred, showing an indoor setting with a person in a dark shirt in the background.

Grace Chow

SELEBGRAM CINA JADI

ARTIS TERCANTIK DI ASIA

Foto : istimewa

Selebgram asal Cina, Grace Chow dinobatkan menjadi artis perempuan tercantik di Asia menurut brand fesyen asal Inggris, Y3NOLOGY. Perempuan berusia 32 tahun itu berhasil mengalahkan Lisa Blackpink yang menduduki posisi kedua dalam daftar tersebut.

Belum lama ini, brand fashion asal Inggris, Y3NOLOGY, merilis I-Magazine Fashion Face Awards Year 2020. I-Magazine Fashion Face Awards Year 2020 sendiri menampilkan daftar 55 perempuan tercantik di Asia berdasarkan penilaian juri di industri hiburan dan software Adobe.

Dalam daftar I-Magazine Fashion Face Awards Year 2020, Grace Chow disebut memiliki kemampuan bercerita yang sangat mengesankan. Selain itu, ia juga cerdas, tangguh, dan juga lembut.

"Saya menikmati setiap foto-fotonya dan semua trik lucu yang dia mainkan. Saya

belajar dari fotografinya," kata Yen Cheung yang merupakan founder dari I-Magazine.

Sementara itu, pakar Adobe Certified Software Expert, Lena Polant, menyebut bahwa Grace Chow pantas berada di dalam daftar teratas karena memiliki proporsi wajah yang ideal. "Grace Chow memiliki dagu lancip, proporsi yang ideal sebagai orang Asia," kata Lena Polant, seperti dikutip dari situs resmi I-Magazine.

Nama Grace Chow sendiri pernah mencuri perhatian karena menjalin hubungan spesial selama 9 tahun dengan penyanyi asal Taiwan, Show Luo. Mengutip Mothership SG,

sayangnya hubungan itu kandas pada 2020 lalu, sebab Show Luo diduga berselingkuh. Bahkan di jejaring Weibo, Grace juga merinci perselingkuhan Show Luo dengan banyak perempuan. Grace menulis bahwa hubungan mereka berantakan ketika ia memeriksa daftar panggilan telepon Show Luo.

Sebelum dikenal karena kisah asmarnya itu, ternyata Grace Chow juga dikenal sebagai selebgram yang kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Selain itu, ia juga dikenal karena memiliki paras yang rupawan. (ist)

10 WANITA TERCANTIK ASIA (VERSI Y3NOLOGY)



1. GRACE CHOW



2. LISA BLACKPINK



3. AHN HYE JIN



4. XU JIAQI



5. TIFFANY HSU



6. JUN JI HYUN



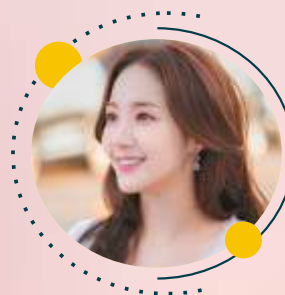
7. JISOO BLACKPINK



8. HYUN JI SHIN



9. SHIN MIN AH



10. PARK MIN YOUNG

Bisa Tularkan Corona, Cek Cara Buang Masker yang Benar

Seiring angka kasus Covid-19 yang masih meningkat, menggunungnya limbah medis ternyata bisa menjadi medium penularan virus. Walhasil, pembuangan limbah infeksius ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau digabungkan sampah rumah tangganya.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Agus Haryono, M.Sc. memaparkan, berdasarkan penelitian terbaru di titik pembuangan sampah Cilincing dan Marunda, jumlah sampah meningkat 5 persen setelah masa pandemi. Namun dari segi berat sampah, justru menurun 25 persen.

Artinya, pembuangan limbah meningkat akibat berlangsungnya pandemi. Akan tetapi, terdapat perubahan aktivitas sehingga isi

limbah berubah. Salah satunya, kini ditemukan sampah masker dan APD di lokasi pembuangan limbah.

"Sejak pandemi Covid-19 pada Maret lalu, semakin hari semakin banyak jumlah sampah maskernya. Ini yang diamati oleh peneliti LIPI, timbunan limbah APD yang dibuang sembarangan. Di kali muara Cilincing, Marunda ditemukan limbah APD terbuat dari plastik," ujarnya.

Ia turut menyebutkan, masalah lain dari limbah akibat pandemi Covid-19 adalah pembuangan dan pengolahan yang berantakan, baik sampah masker bekas masyarakat atau limbah medis dari rumah sakit. Yang berbahaya adalah risiko sampah infeksius pada lingkungan.

"Sekarang mulai hanya ditemukan

pembuangan limbah APD yang melanggar prosedur, alat rapid test dibuang di pinggir jalan. Sampah dari kota Tangerang, yang mana ada hotel untuk karantina, dibuang ke kota lainnya. Kemudian dari rumah sakit ikut dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA)," ujar Dr Agus.

Selain pembuangan limbah medis sesuai prosedur, rumah tangga bisa melakukan penanganan lebih dulu sebelum membuang sampah masker. Caranya, pisahkan sampah masker dari sampah rumah tangga lainnya. Tempatkan sampah masker dalam 1 wadah, diamkan selama 6 hari sebelum dibuang dengan sampah rumah tangga lainnya. Dengan begitu, risiko infeksi dari sampah masker bisa diminimalkan. (ist)

CARA MEMBUANG SAMPAH MASKER DENGAN BAIK DAN BENAR

Lipat menjadi dua bagian dengan bagian dalam masker tertutup

Gulung masker, pastikan dalam kondisi terikat menggunakan perangkat masker

Apabila memungkinkan gunting/sobek masker bekas pakai menjadi 2 bagian

Bungkus masker bekas dengan tissue atau kertas agar terhindar dari penyebaran penyakit

Buang masker ke dalam tempat sampah

SMARTPHONE DIRANCANG MAMPU KENALI INFEKSI COVID-19

Tiga orang pakar Informatika dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) di AS mengembangkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) terkait Covid-19. Mereka menciptakan teknologi analisa suara untuk mengenali infeksi virus coronatanpagejala.

Jordi Lugarta, Ferran Hueto dan Brian Subriana, demikian nama tiga orang pakar itu, memanfaatkan biomarker akustik untuk melacak Covid-19. Biomarker, berupa ciri khas karakter akustik tertentu, ditemukan para peneliti dalam riset sebelumnya pada pasien Alzheimer.

Ketiga pakar informatika MIT itu antara bulan April hingga Mei 2020 mengambil suara dari 5.320 responden. Selain merekam suara batuk, mereka juga merekam suara percakapan biasa. Suara dari 4256 responden kemudian dianalisis komputer menggunakan jejaring neuron artifisial- CNN.

Data akustik dari 1064 responden lainnya, dianalisis menggunakan kecerdasan buatan yang sebelumnya sudah terbukti mampu melacak kasus Alzheimer.

Hasilnya sangat menjanjikan. "Modelnya mencapai sensitivitas 98,4% pada responden yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dalam tes resmi", demikian tulis para peneliti yang dirilis dalam IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Disebutkan, ketepatan diagnosa dalam kelompok responden mencapai 94,2%. Artinya, setiap responden ke-20 mendapat hasil positif yang keliru. "Pada responden yang tidak menunjukkan gejala covid-19 atau asimtomatik, sensitivitas mencapai 100% dengan ketepatan 83,2%. Artinya, setiap kasus Covid-19 yang tidak terlacak, didiagnosa dengan tepat. Tapi sekitar 20 persen responden mendapat diagnosa keliru", ungkap laporan itu.

Para peneliti mengakui, ketepatan diagnosa masih harus diperbaiki, agar aplikasi semacam

itu bisa digunakan dalam terapan praktis. Pasalnya, jika aplikasi smartphone semacam itu dirilis, akan sangat banyak orang memanfaatkannya sebagai alat tes harian. Angka ketepatan diagnosa kemungkinan bisa terus diperbaiki, jika semakin banyak data dianalisa oleh komputer, dan secara masinal kecerdasan buatan makin akurat mengenali biomarker batuk.

Tak Gantikan Tes Laboratorium

Para peneliti di MIT juga menegaskan, app smartphone semacam itu, nantinya bukan sebagai pengganti tes laboratorium, melainkan sebagai salah satu pelengkap. Nantinya, orang hanya perlu batuk-batuk atau bercakap biasa pada smartphone, dan app cerdas akan melakukan diagnosanya.

Mereka menyarankan, metodenya mungkin bisa diterapkan tiap hari pada mahasiswa, pelajar, pegawai dan buruh, untuk melacak batuk yang mencurigakan sebagai alat uji coba. Jika app memberikan tanda peringatan, yang bersangkutan bisa melakukan tes laboratorium, untuk mem-buktikan apakah aplikasi smartphone itu akurat atau tidak.

Para peneliti juga menarik kesimpulan, teknologi kecerdasan buatan itu gratis, tidak invasif, setiap saat siap digunakan dan dengan hasil instan akan menjadi alat bantu yang bisa dipakai secara luas, untuk melacak kasus Covid-19 asimptomatik, dan sekaligus bisa menjadi alat bantu tambahan dalam tindakan yang ada untuk meredam pandemi. (ist)



Cara Sederhana Tampil Kece, Gaya Oversize hingga Berjaket

DUNIA fesyen memang terus berkembang seiring waktu. Itu sebabnya terkadang orang makin bingung ingin mengenakan pakaian seperti apa agar tampil kece saat keluar rumah. Saat ini terdapat beragam jenis gaya yang tersedia. Mulai kasual, feminin, hingga edgy. Jika kamu pandai memadukannya, semua akan terlihat sempurna. Namun jika kamu masih bingung ingin mengenakan gaya seperti apa saat keluar rumah, berikut inspirasi yang akan membuat terlihat kece saat keluar rumah, seperti dilansir Times of India.

GAYA OVERSIZE

Jika kamu sudah mencari alasan untuk membeli semua pakaian oversized baru, langkah pertama untuk mendapatkan tampilan kece adalah dengan mengenakan atasan oversize dan memasangkannya dengan mom jeans atau slouchy jeans. Anda bahkan bisa mengenakan pullover oversized tanpa celana dan memakai sepatu bagus untuk mendapatkan tampilan yang kece abis.

KAUS KLASIK

Sebenarnya penampilan kece akan terbentuk dengan sendirinya saat kamu percaya diri. Bahkan saat hanya mengenakan pakaian sederhana seperti kaus klasik, pastikan untuk tetap menunjukkan kepercayaan diri dan sikap yang benar. Bayangkan kamu terlihat sederhana namun tetap modis dan orang disekitar pasti akan memerhatikan Anda dengan baik.

KENAKAN KEMEJA

Biasanya kamu mengancingkan baju dan membiarkan beberapa kancing atas terlepas. Nah, untuk mendapatkan tampilan kekinian, kamu perlu menurunkan kemeja sedikit di bagian belakang atau dari satu sisi bahu. Hal ini membuat pakaian terlihat sederhana saat kamu sengaja menggunakan tampilan seperti itu. Ini benar-benar tampilan modis dan penuh gaya.

PADUKAN DRESS DENGAN KAUS

Singkirkan cara tradisional mengenakan gaun bertali dan membuatnya terlihat feminin. Fesyen kekinian adalah tentang mengenakan atasan yang pas atau kemeja di bawah gaun bertali dan menyelesaikannya dengan aksesoris dan sepatu bot. Padukan dengan warna atau rona menjadi monokrom, tidak masalah jika memakai sesuatu di balik gaun.

GANTUNGAN JAKET DI BAHU

Gaya ini selalu berhasil. Jika kamu tidak memiliki pakaian oversize, jangan khawatir. Cukup bawa tampilan jaket di atas bahu. Jaket akan langsung menyempurnakan seluruh pakaian dan membuat kamu terlihat fashionable. (ist)



KPK Endus ... (dari hal 1)

KPK menerima informasi ada rumah sakit yang memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) hingga 70 persen. KPK mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait untuk tidak memotong insentif tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima KPK, insentif yang diterima nakes dipotong pihak manajemen RS. Selanjutnya insentif tersebut diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19.

"KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Kendati demikian, KPK tidak merinci lebih lanjut mengenai rumah sakit yang dimaksud. Ipi mengatakan, demi memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.

Insentif dan santunan kepada nakes, lanjut Ipi, merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Diketahui, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Laporan soal pemotongan ini senada dengan kajian KPK. Kajian yang dilakukan KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif nakes dan satuan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Beberapa temuan KPK yaitu ada potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Selain itu, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Tak hanya itu, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan

Atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan. Pertama, pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT). Selanjutnya, pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/

kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. Terakhir, pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes

"Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes yang menangani Covid-19," kata Ipi.

Banyak Nakes Belum Terima Insentif

Lebih ironis lagi, ternyata insentif nakes tahun 2020 ada banyak yang belum dibayar. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengungkapkan adanya temuan itu. Dewi melanjutkan, temuan tersebut didapat berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IX ke beberapa rumah sakit, 4 Februari 2021.

Lebih lanjut, Dewi menyoroti adanya tunggakan insentif 2020 yang diajukan Kemenkes adalah Rp 1,4 triliun. Untuk itu, ia mempertanyakan apakah jumlah tersebut merupakan insentif nakes yang belum dibayarkan kepada nakes pusat, atau sudah sekaligus dengan nakes daerah. "Pertanyaan selanjutnya adalah kapan insentif ini dibayarkan? Karena untuk tenaga kesehatan daerah, kami memahami anggarannya langsung ditransfer ke daerah," ujarnya.

Sementara itu, berbekal penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), insentif nakes daerah diketahui sudah ditransfer sebesar Rp 4,17 triliun. Namun, lanjut dia, masih ada sisa Rp 3,1 triliun yang masih terkendala di pemerintah daerah (Pemda). "Nah, kami mintakan bantuan agar Kemenkes melakukan komunikasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan insentif yang belum dibayarkan," pinta Dewi.

Sementara itu, berdasarkan data Laporan COVID-19 yang dikumpulkan melalui Google Form periode 8 Januari-5 Februari 2021, ada 2.754 (75 persen) dari 3.689 tenaga kesehatan belum atau tidak menerima insentif

sama sekali.

Sekitar 6 persen tenaga kesehatan lain memiliki masalah, baik penyaluran insentif yang tidak teratur atau terlambat, perhitungan insentif tidak sesuai. Bahkan adanya pemotongan dana insentif yang telah diberikan.

"Kami mendesak Pemerintah segera merevisi Keputusan Menteri Kesehatan 2539/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan, yakni memberikan ketentuan batas waktu pencairan dan besaran dana yang adil untuk tenaga kesehatan," tulis Laporan COVID-19.

"Termasuk mekanisme pendataan dan pengusulan insentif yang terbuka, baik di fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan."

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas alur penyaluran dana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri dan instansi terkait, Laporan COVID-19 juga meminta ada keterbukaan informasi tentang besaran alokasi dan proses realisasi dana insentif tenaga kesehatan secara realtime. "Sehingga publik mudah mengakses dan mendapatkan informasinya secara jelas," jelasnya.

Data Laporan COVID-19 juga menunjukkan, dari 2.754 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif, 854 di antaranya pernah atau sedang terinfeksi COVID-19.

Kemudian dari 854 tenaga kesehatan yang terinfeksi, 624 di antaranya adalah tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien COVID-19, sedangkan 230 tenaga kesehatan lainnya tidak menangani pasien COVID-19 secara langsung.

Penyebaran Google Form Laporan COVID-19 untuk mendapatkan data insentif tenaga kesehatan melalui bantuan organisasi profesi, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Persatuan Ahli Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI). (ist,ins)



DATA NAKES YANG BELUM TERIMA INSENTIF

- Total Nakes : **3.689 orang**
- Belum atau tidak menerima insentif sama sekali : **2.754 (75 persen)**
- Memiliki masalah: **221 orang (6 persen)**

MASALAH INSENTIF NAKES :

- Perhitungan insentif **tidak sesuai**
- Penyaluran insentif yang **tidak teratur atau terlambat**
- **Pemotongan dana insentif** yang telah diberikan

Sumber: Survei Laporan COVID-19 periode 8 Januari-5 Februari 2021

NOW!!!

AMAN! UTANG INDONESIA DIKLAIM LEBIH BAIK DARI SINGAPURA

Jakarta—Utang pemerintah selalu menimbulkan polemik. Bahkan karena semakin banyaknya utang negara, muncul pemikiran bahwa setiap bayi yang baru lahir menanggung beban utang. Pemerintah sendiri menegaskan, posisi utang Indonesia saat ini lebih baik dari Singapura. Benarkah?

Stafus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai pembahasan mengenai utang negara sering dimanipulasi. Dia juga menjelaskan porsi utang negara saat ini jauh lebih aman. Sebab porsi utang negara saat ini mayoritas berasal dari utang, bukan pinjaman.

"Kebalik, kalau dulu pinjaman lebih besar dari utang sehingga ada isu kedaulatan. Sekarang isu kita adalah utang itu 86%, pinjaman hanya 14%," terang Yustinus dalam webinar Kantor Staf Presiden di Jakarta, Selasa (23/02).

Pinjaman sendiri artinya pembiayaan melalui utang yang diperoleh oleh pemerintah dari lembaga pemberi pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri yang diikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu mengikat

dalam berbagai hal.

Sementara utang merupakan instrumen surat uang yang diterbitkan oleh pemerintah, bentuknya berupa surat berharga negara (SBN). Utang ini sama seperti produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah.

Selama 2020 pemerintah sendiri menarik utang sebesar Rp 1.226,9 triliun. Terdiri dari SBN Rp 1.117,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 49,7 triliun."Dan sebagian besar utang itu dimiliki oleh orang Indonesia dalam bentuk rupiah. 70%-nya itu rupiah dimiliki oleh orang Indonesia. Sehingga yang menikmati imbal hasilnya orang Indonesia," katanya.

Bahkan menurutnya, rasio pendapatan pajak terhadap utang Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain, termasuk Singapura.

"Kita relatif lebih baik dan rasio penerimaan negara atau penerimaan pajak terhadap utang kita cukup bagus dibandingkan banyak negara," katanya.

Ia mencatat selama 10 tahun terakhir (2010-2019), rasio utang pemerintah pusat dijaga mencapai 30 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kecuali pada 2020, persentasenya meningkat menjadi 38,7 persen karena dampak pandemi COVID-19 dengan total utang pemerintah pusat mencapai Rp 6.074,56 triliun, terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 5.221,65 triliun dan pinjaman Rp 852,91 triliun.

Dalam paparannya, rasio pendapatan pajak terhadap utang Indonesia pada 2018 mencapai 38,32 persen. Posisi itu masih lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 21,83 persen, Singapura 11,93 persen. Bahkan, Thailand mencapai 35,73 persen, Filipina mencapai 36,98 persen dan Brasil

mencapai 14,05 persen. "Kita di bawah Turki, Afrika Selatan tapi kita jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina artinya kita punya kemampuan lebih besar dalam membayar utang," katanya.

Pemerintah, kata dia, akan menjaga debt service ratio (DSR) agar memiliki kemampuan membayar terutama utang luar negeri. Adapun DSR pada 2020 mencapai 23,8 persen atau naik dibandingkan 2019 mencapai 18,4 persen karena meningkatnya jumlah pinjaman jatuh tempo sehingga menambah porsi cicilan pokok.

Selama ini, isu utang memang menjadi bahan kritik utama ke pemerintah Jokowi. Salah satu misalnya datang dari eks staf khusus Menteri ESDM Said Didu. "Perlu diwaspadai adanya mafia utang yg menjebak NKRI karena selain jumlah yang makin besar, juga bunga makin tinggi - bunga jauh lebih tinggi dari bunga utang negara lain," kata dia pada September 2020.

Lalu, ada juga kritikan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie yang menyoroti obligasi pemerintah Indonesia saat ini laris manis karena pemerintah yang berani bayar bunga tinggi. "Yang bayar bunga yang membengkak terus kan kaum milenial, yang pandai membuat unicorn? perhatikan kalau talk show kan pinter-pinter," kata Kwik Kian Gie pada 4 Februari 2021. (Ist)

2. CICILAN POKOK UTANG

- Sebelumnya 2004, pembayaran bunga utang lebih tinggi dari cicilan pokoknya. Tapi mulai 2004, pembayaran cicilan yang lebih tinggi.
- Pada 2000, total utang pemerintah yaitu sebesar Rp 1.232,78 triliun. Bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 50,7 triliun (4,06 persen). Sementara pembayaran cicilan pokok saat itu hanya Rp 33,05 triliun (2,6 persen).
- Lalu pada 2020, utang sudah naik mencapai Rp 6.074,78 triliun. Bunga utang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 314 triliun (5,17 persen). Tapi, pembayaran cicilan pokok sudah lebih tinggi yaitu Rp 444,14 triliun (7,3 persen).

1. BUNGA UTANG

- Total utang pemerintah terus naik dalam 20 tahun terakhir. Pada 2000, total utang mencapai Rp 1.232,78 triliun dengan pembayaran bunga utang Rp 50,07 triliun (4,06 persen).
- Lalu pada 2020, utang Indonesia naik menjadi Rp 6.074,56 triliun dengan bunga Rp 314 triliun (data sementara). Sehingga, persentasenya mencapai 5,17 persen.
- Tapi dari 2000 ke 2009, pembayaran bunga utang cenderung fluktuatif. Pernah naik sampai 7,16 persen pada 2002, tapi pernah juga turun jadi 4,39 persen pada 2005. Barulah pada 2010 hingga sekarang, rasionya stabil di rendah 4-5 persen.

